



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9803/OTDA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan, mengumpulkan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan bidang tugas Perangkat Daerah (PD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasikan melalui biro koordinatornya, serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (iLPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

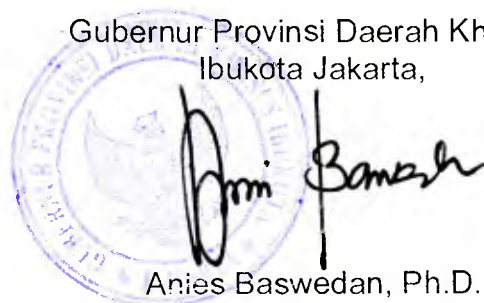
- KEDUA : Inspektur/Para Kepala Badan/Para Kepala Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris DPRD/Para Kepala Biro, agar melaksanakan :
- a. penyusunan Data LPPD pada setiap PD/OPD Tahun 2018 sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini, dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT (OPD) yang berada di bawahnya;
  - b. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini;
  - c. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini, yaitu Lampiran III.a yaitu untuk PD/OPD dengan satu urusan dan Lampiran III.b yaitu untuk PD/OPD dengan dua urusan;
  - d. pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana format dalam Lampiran IV Instruksi Gubernur ini;
  - e. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G lantai 10, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon 3822107/3822309 paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2019 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* melalui surat elektronik ke [lppd.dki.2014@gmail.com](mailto:lppd.dki.2014@gmail.com);
  - f. penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (*Liaison Officer/LO*), yang menguasai informasi dan permasalahan pada SKPD masing-masing, dengan biodata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Instruksi Gubernur ini, paling lambat Minggu Pertama bulan Februari 2019;
  - g. para PD/OPD dapat melihat tugas dan petunjuk data pokok yang diperlukan dalam penyusunan LPPD serta menyiapkan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Instruksi Gubernur ini; dan
  - h. penyampaian data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPD Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Para Walikota dan Bupati agar merekapitulasi laporan/data dari Sekretariat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018 dan memasukkannya ke dalam data pendukung Fungsi Penunjang Lainnya serta menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2019 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

- KEEMPAT : Laporan dari PD/OPD yang dipecah atau digabung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 agar dikoordinasikan secara bersama antara PD/OPD yang lama dan baru.
- KELIMA : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan penyusunan LPPD Provinsi paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret 2019 dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2019, melaksanakan *self assesment* (evaluasi mandiri) dan memfasilitasi serta mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2018 pada Triwulan III Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah serta Para Kepala Biro Koordinator saling membantu pelaksanaan penyusunan dan evaluasi untuk mencapai target indikator pencapaian Gubernur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/UKPD /OPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

SISTIMATIKA PENYUSUNAN DATA LPPD

A. Urusan Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
2. Program dan Kegiatan
  - a. Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah

Contoh : Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah  
Urusan.....

No	Program Nasional	Program Daerah
Jumlah		

b. Jumlah dan Realisasi Kegiatan Tahun 2018

Contoh : Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan.....

No	Nama Program	Jml. Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1	2	3	4	5 (4/3)
	Jumlah			

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Pencapaian SPM

Cantumkan daftar SPM dan pencapaiannya sesuai dengan urusan yang dilaksanakan selama periode RPJMD (2017-2022)

Bila belum ada SPM gunakan IKU SKPD atau bila dimungkinkan SPM dan IKU ditulis kedua-duanya. Dalam hal ini SPM bisa juga dijadikan IKU. Bila SKPD belum memiliki SPM dan IKU, cantumkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan yang merupakan program atau kegiatan unggulan yang mencakup target dan realisasi yang terukur.

Contoh : Tabel Capaian SPM/IKU Urusan .....

No	Uraian SPM/IKU/Tapkin	Target 2015-2016		Capaian tahun			
		Volume	Satuan	2015	2016	2017	2018

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Instruksi Gubernur ini diuraikan pada bagian ini.

IKK sedapat mungkin menggambarkan data selama masa RPJMD atau minimal 2 tahun terakhir

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Menerangkan jumlah kualitas dan klasifikasi seluruh pegawai pada PD dan UKPD dalam satu Perangkat Daerah

## a. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel : Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Dinas/Badan.....

No	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas						Jumlah
			JP	JU	JB	JS	JT	KS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3 s.d 9)
A.	Golongan (jumlah)								
	• Golongan IV								
	• Golongan III								
	• Golongan II								
	• Golongan I								
B	Eselon (jumlah)								
	• Eselon I								
	• Eselon II								
	• Eselon III								
	• Eselon IV								
	• Eselon V								
	• Fungsional								
	• Staf								
C	Pendidikan(jumlah)								
	• S3								
	• S2								
	• S1								
	• Diploma								
	• SLTA								
	• SLTP								
	• SD								

Catatan :

Kolom 3 sampai 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada PD masing-masing.

## b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat dan Diklatpim

Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pada Dinas/ Badan.....

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang Terisi	Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persyaratan		
				Pendidikan	Pangkat	Diklatpim
1	2	3	4	5	6	7
1	• Eselon I					
	• Eselon II					
	• Eselon III					
	• Eselon IV					
	Jumlah					

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Merupakan akumulasi data dari PD, UKPD dan UPT dari PD yang bersangkutan sesuai urusannya

Tabel : Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan.....

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Anggaran Urusan Pendidikan		
1. Belanja tidak langsung		
2. Belanja langsung		
a. Belanja Barang dan Jasa		
b. Belanja Pemeliharaan		
c. Belanja Modal		
d. Belanja Modal		
Catatan Perbandingan :		
• Alokasi Anggaran Urusan : APBD		
• Belanja Modal : Belanja urusan		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang dan Jasa		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan		

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan PD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan *top down* yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPD dan RKT atau Renja SKPD) maupun *bottom up*, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lain-lain.

Contoh Tabel : Sinkronisasi perencanaan program urusan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	10	RENJA SKPD; RKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	10	RKA: RENJA SKPD	100
3	RKA 2018	10	DPA : RKA	100
4	DPA 2018	10		

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

## a. Prasarana berupa tanah (bila ada)

Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (aset) PD dan jumlah bidang tanah yang telah dimanfaatkan (bila mungkin dengan luasnya)

## b. Prasarana utama pendukung tupoksi

Contoh : Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah, dll; Dinas Pemuda dan Olahraga menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olah raga dan seterusnya.

## c. Fasilitas/prasarana informasi

Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas/Badan.....

No	Jenis Fasilitas/Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Dinas	JP	JU	JB	JS	JT	KS	UPT	
1	Papan Pengumuman									
2	Kotak Pengaduan									
3	Media Massa									
4	Email									

Catatan:

- Website :
- Email :

d. Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan

#### 8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya.

Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan Tahun 2018 di DKI Jakarta antara lain, (contoh) :

- a. Saat ini dibutuhkan banyak pegawai sebagai penjaga sekolah, guru olahraga dan guru lainnya.
- b. Terdapat 233 SDN dan 39 SMPN yang berada di daerah rawan banjir.
- c. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium dan ruang UKS serta rumah dinas Kepsek/guru/penjaga sekolah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menambah SDM aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekurangan penjaga sekolah antara lain diatasi dengan Petugas Harian Lepas (Phl) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekrutmen pegawai, perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitasi berat/total.

#### 9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a. Daftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan Kepala PD (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dll)
- b. Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SDM, prosedur, teknologi informasi, dll.
- c. Prestasi nasional dan internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

#### B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta data terlampir (Lampiran II)
2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran III.a dan Lampiran III.b.

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, tingkat pencapaian kinerja urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lampiran IV)



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.



Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

No.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capain Kinerja	Keterangan
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/Kota memiliki Perda IMB	Jumlah Kab/Kota memiliki perda IMB dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak -- -- daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atau PTSP
		Peraturan kependudukan	2	Perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP Jumlah Kab/kota.	..... %	Sumber data dari Dinas Dukcapil
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2018 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018= ---- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 = ----orang	... per 50.000 penduduk	Sumber data dari BKD dan Dukcapil
		Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007	Waktu Penyampaian LPPD 2018 (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman: LPPD tahun 2018 disampaikan pada tanggal ---- tanggal ---- 2019. Nomor ---- tanggal ---- 2019.	Tepat/tidak	Sumber data dari Biro Pemerintahan/Otda
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lap Keuangan dan Lap Kinerja berdasarkan PP 8/2006	Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 2018 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman: Laporan Keuangan 2018, disampaikan ke BPK RI tanggal ---- 2019 sesuai Surat Pengantar nomor ---- tanggal ---- 2019	Tepat/tidak	Sumber data dari BPKD dan ORB
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Waktu Penyampaian Laporan Kinerja 2018 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal / bulan / tahun )	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100% Rata-rata= .....urusan= ..... Kab/Kota	Tepat/tidak	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial Sumber data dari Bagian ORB

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capain Kinerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	7	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MoU yang masih berlaku sampai tahun 2018 1. No dan tgl MoU yang berlaku s.d tahun 2018 2. No dan tgl MoU yang berakus d tahun 2018 3. Dst...	Jumlah MoU yang masih berlaku sampai tahun 2018 1) MoU dengan ----- tentang kerjasama 2) MoU dengan ----- tentang kerjasama ...Dst...	.....MoU	Sumber data dan Biro Tata Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional dibagi 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional.	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ----- program. - Prioritas Pembangunan Nasional <sup>1</sup> (RKP), sebanyak ---- program	..... %	Sumber data dari BAPPEDA
		Kewenangan	9	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota dibagi Jumlah Kabupaten/Kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan.	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota Jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan	..... %	
		Keuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2018	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2018	Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor: -----Tahun-----tentang-----APBD 2018	Tepat/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKD/Hukum. Tidak tepat, apabila APBD Ditetapkan setelah 31 Desember 2018
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor: -----Tahun-----tentang----- (pengelolaan keuangan daerah)	Adar/tidak	Sumber data dari BPKD
			12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) PU dan Tata Ruang Rp. ----- 4) Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. ----- 5) Transibum dan Linmas Rp. ----- 6) Sosial Rp. ----- Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari BPKD. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

<sup>1</sup> Program prioritas pembangunan nasional (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ; (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Peningkatan kemiskinan, (5) Ketahanan pangan, (6) Infrastruktur, (7) Klim investasi dan iklim usaha, (8) Energy, (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) Daerah tertinggal, terdapat, tertinggal dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
			13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018 1) Urusan Pendidikan Rp. .... 2) Urusan Kesehatan Rp. .... Total Belanja Pend & Kes Rp. .... Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp. ....	....%	Sumber data dari BPKD
		Pelayanan Publik	14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak Perda tentang Pelayanan Publik	Perda tentang Pelayanan Publik <sup>2</sup>	Ada/Tidak	Sumber data dari Biro Hukum/PTSP
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2018 dibagi Penduduk pada akhir tahun 2018	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2018 Penduduk pada akhir tahun 2018	-----	Pembilang: Sumber data dari BKD Penyebut: Sumber data dari Dukcapil
			16	Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, Sebutkan nama lengkap dari Sistem database:----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	17	Penataan OPD	Jumlah pembentukan OPD Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah OPD, sbb: 1) Biro (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya 7) Kabupaten/kota = -- unit	-----unit	Sumber data dari ORB
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk perundangan	18	Jumlah Perda tahun 2018	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2018, sebanyak---- Perda (Daftar Perda terlampir)	Perda	Sumber data dari Biro Hukum
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018, sebanyak----PERDA. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak----RAPERDA.	%	Sumber data dari Biro Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018 dibagi Keputusan DPRD dalam tahun 2018 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018 sebanyak ---- keputusan - Keputusan DPRD dalam tahun 2018 sebanyak ---- keputusan	%	Sumber data dari Set. DPRD

<sup>2</sup>Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang menetapkan indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/Pimpinan LPND.

No	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (Kepgub) Tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub)	21 22	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah Kepgub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kepgub dalam tahun 2018 x 100% Jumlah Pergub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Pergub dalam tahun 2018 x 100%	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ---- keputusan. Keputusan Gubernur dalam tahun 2018, sebanyak ---- keputusan. - Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ---- keputusan. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2018, sebanyak ----	..... % ..... %	Sumber data dari Biro Hukum Sumber data dari Biro Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah Perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi jumlah perda yang dikirimkan kepada pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ---- Perda yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ---- Tahun 2018 tentang ---- 2) Perda Nomor ---- Tahun 2018 tentang ---- Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ---- Perda.	..... %	Sumber data dari Biro Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau Pergub tentang konsultasi publik Media informasi perda yang dapat diakses oleh publik	24 25	Keberadaan perda atau Pergub tentang konsultasi publik Adanya media informasi perda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro, humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada Perda atau Pergub tentang konsultasi publik Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Pergub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor Tahun ---- tentang ---- (konsultasi publik) Apabila ADA, Sebutkan nama media informasinya ---- dan. Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : ---- Tahun ---- tentang ----	Ada/tidak Ada/tidak	Sumber data dari Biro Hukum/BAPPEDA Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD	26 27 28	Dana perimbangan yang dibanding direncanakan Belanja Publik terhadap DAU Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100% Total belanja langsung dibagi DAU thn 2018 x 100% Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Rp. ---- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. ---- - Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. ---- - DAU Tahun 2018, sebesar Rp. ---- Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp. ---- Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp. ----	..... % ..... % ..... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD) Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD) Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)

No	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI, PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD (Realisasi)	Jumlah PAD (Realisasi) Tahun 2018 dibagi Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018 x 100%	- PAD APBD Tahun 2018, sebesar Rp ---- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018 (Realisasi), sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dan Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, TATAUSAHA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: ---- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: ----	Opini tahun 2017 = ---- Opini tahun 2018 = ----	Opini.: WTP/ unqualified opinion); WDP/ qualified opinion); TMP/ disclaimer opinion), atau TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).
		Besaran SILPA	31	SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp ---- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dan Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)
		Realisasi Pendapatan	32	Realisasi terhadap PAD anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp ---- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dan Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKD)
		Realisasi belanja	33	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp ---- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. ----	..... %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektoral Provinsi	34	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak ---- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2018, sebanyak ----temuan	..... %	Sumber data dari Inspektoral. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD <sup>3</sup>	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. ---- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2018, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dan BPKD
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau (PAD 2018- PAD 2017) : PAD 2017 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dari BPKD (target tahunan dalam RPJMD)

No	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
13	TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Jumlah penghargaan dan Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	.... Penghargaan	Sumber data dari OPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada Perda/Keputusan KDH tentang E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP/BPPBJ Data berupa proses e-procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2018	Persetujuan izin investasi pada Tahun 2018, sebanyak ..... izin dengan total nilai investasi sebesar Rp .....-	... izin	Sumber data dari PTSP (PMDN Nilainya >=500 jt)

<sup>3</sup>Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RP-JMD

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI  
UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI:  
NAMA PD :

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

(1)	ASPEK (2)	FOKUS (3)	NO (4)	IKK (5)	Rumus (6)	Jenis Data (7)	Capaian Kinerja (8)	KETERANGAN (9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional yang melekat dikemertrian /LPND yang harus dilaksanakan oleh SKPD  Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan pemerintah Kementerian/LPNK	1	Jumlah Nasional yg Dilaksanakan SKPD  Program Nasional yg Dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.....%  Ada / Tidak Ada:	Lihat Program Nasional RKP 2018 Untuk masing-masing urusan, terlampir.  SOP adalah petunjuk tertulis Mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Jumlah SOP: SOP #1 Pelaksanaan UN SOP #2 Penerimaan Siswa Baru SOP #3 Juknis Kalender Pendidikan Dst...	.....%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Jumlah jabatan yang harus ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada - Jumlah jabatan yang harus ada	.....%	Sumber data BKD

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #1 Dst...	Ada/tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018
			6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	.....%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinian	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinian dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim - Jumlah pejabat SKPD yang ada.	.....%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan Jumlah pejabat SKPD yang ada	.....%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENJASTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada -RENJASTRA SKPD -RENJASKPD -RKA-SKPD	.....jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	.....%	Mengacu dokumen RPKD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD	.....%	Mengacu dokumen RKA-SKPD Tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD	.....%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018



(1)	ASPEK (2)	FOKUS (3)	NO (4)	IKK (5)	Rumus (6)	Jenis Data (7)	Capaian Kinerja (8)	KETERANGAN (9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD Total belanja APBD (anggaran)	.....%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja Modal SKPD - Realisasi Total Belanja SKPD	.....%	Mengacu LKD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD - Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	.....%	Mengacu LKD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD - Total Realisasi Belanja SKPD	.....%	Mengacu APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Caik)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Caik)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Laporan keuangan SKPD	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Caik)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100%	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak-----aset. - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak-----aset.	.....%	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
8	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD	

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran III.b : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI:  
NAMA PD :  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan -----
2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh PD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)	Urusan(1)---- (8A)	Urusan(2)---- (8B)	
1	KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementerian/ LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	(4) 1	(5) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD oleh jumlah program Nasional x 100%	(6) Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	(7A) Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak---- program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD,se banyak----program	(7B) Jumlah program (RKP), sebanyak----program. Jumlah nasiona Yang dilaksanakan SKPD, sebanyak---- program	(8A) .....%	(8B) .....%	(9)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen /LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak---- yang terdiri dari: 1. SOPttg---- 2. SOPttg---- 3. SOPttg---- 4. Dst----	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak-- yang terdiri dari: 1. SOPttg---- 2. SOPttg---- 3. SOPttg---- 4. Dst----	Ada---- --SOP/ TidakAda.	Ada---- --SOP/ TidakAda.	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)	Urusan(1)---- (8A)	Urusan(2)---- (8B)		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	7	8	9	10	11	12	13	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	KETERANGAN	
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)	Urusan(1)---- (8A)	Urusan(2)---- (8B)	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -SKPD -RENJASKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ada tahun 2016, sebanyak----- jenis, yg terdiri dari: 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, sebanyak-----jenis, yg terdiri dari: 1..... 2..... 3.....	.....jenis dokumen	.....jenis dokumen	
10	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak----- program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak-----	Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak----- program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak-----	.....%	.....%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs	
11	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak----- program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak-----program.	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak-----program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak----- program.	.....%	.....%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs	
12	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DP SKPD, sebanyak-----program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak-----program.	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak-----program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	.....%	.....%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	Realisasi SKPD total APBD	Realisasi SKPD terhadap total APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	Total realisasi: belanja SKPD, sebesar Rp,----- Total Belanja APBD, sebesar Rp,-----	Total belanja SKPD, sebesar Rp,----- Total Belanja APBD, sebesar Rp,-----	.....%	.....%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	KETERANGAN	
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)			
(1)	(2)	(3) Besaran belanja modal	(4) 14	(5) Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	(6) Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	(7A) - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. .... - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ....	(7B) - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. .... - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ....	(8A) .....%	(8B) .....%	(9) Mengacu LKD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. .... - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ....	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. .... - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ....	.....%	.....%	Mengacu LKD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. .... - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ....	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. .... - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ....	.....%	.....%	Mengacu APBD tahun 2018
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak-----jenis, sbb: 1..... 2.....	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak-----jenis, sbb: 1..... 2.....	Tidak Ada/A da sebanyak-----jenis:	Tidak Ada/A da sebanyak-----jenis:	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
		Penggunaan Aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100%	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak-----aset. - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak-----aset.	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak-----aset. - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak-----aset.	.....%	.....%	
			20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keilling 5. Media Masa	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak-----jenis.	Jumlah sebanyak-----jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan(1)----	Urusan(2)----	Urusan(1)----	Urusan(2)----	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada,sebutkan survey kepuasan tentang-----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang-----	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

IKK TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD  
TERHADAP LPPD TAHUN 2018

URUSAN WAJIB						
No (1)	Urusan (2)	No. (3)	IKK (4)	Rumus (5)	Capaian Kinerja (6)	Keterangan (7)
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	%	Pembilang dari Dinas Pendidikan Penyebut berasal dari Dinas Sosial/Dukcapil
2		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	%	Pembilang dari Dinas Pendidikan Penyebut berasal dari Dinas Sosial/Dukcapil
3		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	%	Pembilang dari Dinas Pendidikan Penyebut berasal dari Dinas Sosial/Dukcapil
4		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C ----- x 100 %	%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Dukcapil
5		5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA	%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
6		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100% Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya	%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
7		7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi -----x100%	%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
8		8	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	Jumlah Guru jenjang SD/MI	%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
9		9	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi -----x100% Jumlah Guru jenjang SMP/MTS	%	Sumber data dari Dinas Pendidikan



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	10	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi .....x100%	%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
11	Fasilitas dan Asistensi, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	11	Fasilitas dan Asistensi, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Pendidikan
12	Kesehatan	12	Cakupan kompensasi kebidanan yang ditangani	Peta penjaminan mutu pendidikan Jumlah kompensasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu .....x100%	%	Sumber data dan Dinas Kesehatan
13		13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja Pada kurun waktu yg kurun waktu tertentu .....x100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
14		14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu .....x100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
15		15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama Jumlah Desa/Kelurahan UCI x 100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
16		16	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama .....x100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
17		17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBCBTA (+) yang ditemukan dan diobat disatu wil. Kerja selama 1 tahun .....x100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
18		18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah perkiraan penderita baru TBCBTA (+) dalam kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wil. Kerja selama 1 tahun .....x100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
19		19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin disarana kesehatan Strata1 .....x 100%	%	Sumber data dari Dinas Kesehatan
		19	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu .....x100%	%	Sumber data dan Dinas Kesehatan
				Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah kerja pada kurun waktu yang	%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	20	Pencemaran Udara	Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri .....x100% Jumlah seluruh kabupaten dan kota	.....%	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup
		21	Pasar	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik .....x100% Jumlah seluruh pasar tradisional	.....%	Biro Perekonomian/BPBUMD
		22	Tempat pembuangan sampah (TPS)	Jumlah daya tampung TPS (m3) .....x1000 Jumlah penduduk	.....%	Pembilang dari Dinas LH Penyebut dari Dukkcapil
		23	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ..... x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada	.....%	Sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik .....x100% Panjang seluruh jalan provinsi	.....%	Dinas Bina Marga
		25	Rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ..... x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	.....%	Biro PKLH
		26	Kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh ..... x 100 % Luas Wilayah	.....%	Dinas Perumahan Rakyat/Bappeda
		27	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ..... x 100 % Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta	.....%	Biro PKLH, Dinas Kehutanan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ..... x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	.....%	Biro PKLH
		29	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ..... x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemda yang bersangkutan.	.....%	Biro PKLH dan Dinas Perumahan Rakyat
6	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelanggang /balai remaja(selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota .....x1000 Jumlah penduduk	.....%	Pembilang dari Disorda dan Penyebut dari Dukkcapil
		31	Lapangan olah raga	Jumlah lapangan olahraga yang ada .....x1000 Jumlah penduduk	.....%	Pembilang dari Disorda dan Penyebut dari Dukkcapil
7	Penanaman Modal	32	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2018- Realisasi PMDN 2017 ..... x100% Realisasi PMDN 2017	.....%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif .....x100% Jumlah seluruh koperasi	%	Dinas Koperasi dan UKM
9	Kependudukan & Catatan Sipil	34	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil .....x100% Jumlah seluruh UKM	%	Dinas Koperasi dan UKM
10	Ketenaga Kerjaan	35	Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Dukcapil
11	Ketahanan Pangan	36	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif .....x100%	%	Disnakertrans
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan .....x100%	%	Disnakertrans
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38	Regulasi ketahanan pangan	Jumlah pencari kerja yang mendaftari Ada / Tidak	Ada/tidak ada	DKPKP
14	Perhubungan	39	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) .....x1000	%	DKPKP
15	Komunikasi & Informatika	40	Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	Jumlah penduduk Pekerja perempuan dilembaga pemerintah .....x100% Jumlah pekerja perempuan	%	DPPAPP /Disnakertran
16	Pertanahan	41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan .....x100% Jumlah angkatan kerja perempuan	%	DPPAPP /Disnakertran
17	Pertanian	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif .....x100% Jumlah pasangan usia subur	%	DPPAPP
18	Pendidikan	43	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) setiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB .....x100%	%	DPPAPP
19	Perdagangan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat	%	Dishub
20	Perencanaan	45	Website milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak	Ada/tidak ada	Dskominfotik
21	Perikanan	46	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan pertahun	.....	Dskominfotik/Disparbud
22	Perumahan	47	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....x100% Luas lahan yang seharusnya bersertifikat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	.....	BPAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	48	PKK aktif	Jumlah PKK aktif .....x100%	.....%	DPPAPP
18	Sosial	49	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat disuatu daerah	.....%	Dinas Sosial
		50	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan ..... x100%	.....%	Dinas Sosial
19	Budaya	51	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	.....%	Disparbud
		52	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	.....%	Disparbud
20	Statistik	53	Buku "Propinsi dalam angka"	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	.....%	Diskominfotik
		54	Buku "PDRB Provinsi"	Ada/Tidak	Ada/ tidak*)	Diskominfotik
21	Kearsipan	55	Pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ..... x100%	.....%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		56	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah SKPD	.....%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Perpustakaan	57	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	.....%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		58	Pengunjung perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah ..... X 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	.....%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Tranribum Linmas	59	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ..... X 100 % Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	.....%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		60	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	.....%	Bakesbangpol
				Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	.....%	Bakesbangpol

URUSAN PILIHAN						
No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelautan & Perikanan	1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun) -----x100%	%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
		2	Ekspor hasil perikanan	Target Daerah (Ton/tahun)	%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
		3	Konsumsi ikan	Nilai export hasil perikanan (Rp) -----x100%	%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
2	Pertanian	4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Target daerah Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) -----x100%	%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian
		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2018**	Target Daerah (Kg) Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) Luas areal tamanan padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian -----x100%	%	Dinas KP Kelautan dan Pertanian, Biro Perekonomian
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Jumlah total PDRB Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi -----x100%	%	Dinas Kehutanan
		7	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan ----- x 100%	%	Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa izin	Luas Kawasan Hutan Luas Penambahan Liar yang diterbitkan ----- x 100%	%	Dinas Perindustrian dan Energi
		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2018**	Luas area penambangan yang liar Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ----- x 100%	%	Dinas Perindustrian dan Energi, Biro Perekonomian
5	Parwisata	10	Kunjungan wisata	Jumlah total PDRB Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	.....orang	Disparbud
		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018**	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100%	%	Disparbud, Biro Perekonomian
6	Perindustrian	12	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2018**	Jumlah total PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ----- x 100%	%	Dinas Perindustrian dan Energi, Biro Perekonomian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Perdagangan	13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	Jumlah Industri tahun 2017 - Jumlah Industri tahun 2016 -----x100% Jumlah Industri/tahun 2017	.....%	Dinas Perindustrian dan Energi
		14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100% Jumlah total PDRB	.....%	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan, Biro Perekonomian
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor	US\$. .....	Dinas Koperasi dan UKM serta Perdagangan
8	Transmigrasi	16	Transmigrasi swakarsa	Jumlah transmigrasi swakarsa -----x100% Jumlah transmigrasi	.....%	Disnakertrans
<b>FUNGSI PENUNJANG</b>						
1	Fungsi Penunjang	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Bappeda
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Bappeda
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD	Ada/tidak	Ada/ tidak*)	Bappeda
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----- x100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	.....%	Bappeda
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	.....	Diskominfotik/OPD yang menangani
		6	Tapal batas	Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan ----- x100% Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan	.....%	Biro Tapem

Keterangan

\*)pilih salah satu

\*\*)Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2017



Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran V : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

**BIODATA *LIAISON OFFICER***  
**LPPD TAHUN 2018**

Nama : \_\_\_\_\_

NIP/NRK : \_\_\_\_\_

Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Perangkat Daerah : \_\_\_\_\_

Alamat kantor : \_\_\_\_\_

Telp dan Fax kantor : \_\_\_\_\_

No. Handphone : \_\_\_\_\_

Alamat email : \_\_\_\_\_



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran VI : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 31 Januari 2019

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2018

No.	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	SKPD/UKPD
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI</li> <li>2. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI</li> <li>3. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS</li> <li>4. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS</li> <li>5. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA</li> <li>6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMA/MA</li> <li>7. Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C</li> <li>8. Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun</li> <li>9. Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA</li> <li>10. Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya</li> <li>11. Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA</li> <li>12. Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajara sebelumnya</li> <li>13. Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA</li> <li>14. Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya</li> <li>15. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi</li> <li>16. Jumlah Guru jenjang SD/MI</li> <li>17. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi</li> <li>18. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS</li> <li>19. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi</li> <li>20. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA</li> <li>21. Peta penjaminan mutu pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ol>
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</li> <li>2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</li> <li>3. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oieh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</li> </ol>	Dinas Kesehatan



No.	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		4. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama 5. Jumlah Desa/Kelurahan UCI 6. Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 7. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di saat wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 8. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 9. Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 tahun 10. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 11. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 tahun 12. Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 13. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 14. Jumlah seluruh masyarakat miskin 15. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 16. Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	
3.	Lingkungan Hidup	1. Jumlah Kabupaten dan Kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah pasar tradisonal yang tergolong baik 3. Jumlah seluruh pasar tradisional 4. Jumlah daya tampung TPS (m3) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari jumlah kasus yang ada 6. Jumlah kasus lingkungan yang ada	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Biro Perekonomian 3. BPBUMD 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan Provinsi 3. Jumlah rumah tangga bersanitasi 4. Jumlah total rumah tangga 5. Luas kawasan kumuh 6. Luas wilayah 1. Luas ruang terbuka hijau 2. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta 3. Perda tentang IMB	1. Dinas Bina Marga 2. Dinas Perumahan Rakyat 3. Biro PKLH 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Kehutanan 3. Biro PKLH
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 2. Jumlah seluruh rumah tangga 3. Jumlah rumah layak huni 4. Jumlah seluruh rumah	1. Dinas Perumahan Rakyat 2. Biro PKLH
6.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (milik pemerintah) 2. Jumlah lapangan olahraga milik Pemda 3. Jumlah Penduduk tahun 2018	1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Pendidikan

No.	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	SKPD/UKPD
7.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai realisasi PMDN 2017 (miliar rupiah)</li> <li>2. Nilai realisasi PMDN 2018 (miliar rupiah)</li> <li>3. Jumlah proyek PMDN</li> <li>4. Nilai realisasi PMA 2017 (miliar rupiah)</li> <li>5. Nilai realisasi PMA 2018 (miliar rupiah)</li> <li>6. Jumlah proyek PMA</li> </ol>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8.	Koperasi & UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah koperasi aktif</li> <li>2. Jumlah koperasi</li> <li>3. Jumlah Usaha Mikro &amp; Kecil</li> <li>4. Jumlah seluruh UKM</li> <li>5. Jumlah total PDRB tahun 2018</li> <li>6. Nilai ekspor dan impor DKI Jakarta tahun 2018</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan</li> <li>2. Biro Perekonomian</li> </ol>
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan database kependudukan</li> <li>2. Perda tentang kependudukan</li> <li>3. Jumlah penduduk DKI Jakarta per Desember 2018</li> <li>4. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah terekam E-KTP</li> </ol>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif</li> <li>2. Jumlah pekerja/buruh</li> <li>3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar</li> <li>4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan</li> </ol>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen regulasi ketahanan pangan</li> <li>2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama</li> </ol>	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah</li> <li>2. Jumlah pekerja perempuan</li> <li>3. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan</li> <li>4. Jumlah angkatan kerja perempuan</li> </ol>	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pasangan usia subur</li> <li>2. Jumlah peserta program KB aktif</li> <li>3. Jumlah PLKB/PKB</li> </ol>	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah angkutan darat</li> <li>2. Jumlah penumpang angkutan darat</li> </ol>	Dinas Perhubungan
15.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website milik Pemda</li> <li>2. Jumlah dan jenis pameran/expo</li> <li>3. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi</li> </ol>	Diskominfo
16.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah seluruh luas lahan bersertifikat milik Pemprov DKI Jakarta</li> <li>2. Jumlah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat milik Pemprov DKI Jakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPAD</li> <li>2. Biro PKLH</li> </ol>
17.	Trantibum Linmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Partai Politik</li> <li>2. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah</li> <li>3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP</li> <li>4. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP</li> </ol>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota PKK</li> <li>2. Jumlah anggota PKK aktif</li> </ol>	DPPAPP

No.	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	SKPD/UKPD
19.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah</li> <li>2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial</li> <li>3. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan</li> </ol>	Dinas Sosial
20.	Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya</li> <li>2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya</li> <li>3. Jumlah sanggar kesenian</li> </ol>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku 'Provinsi dalam Angka'</li> <li>2. Buku "PDRB Provinsi"</li> </ol>	Diskominfotik
22.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku</li> <li>2. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 2017</li> <li>3. Jumlah pejabat fungsional kearsipan</li> </ol>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah koleksi judul buku minimal 2 tahun terakhir</li> <li>2. Jumlah koleksi buku minimal 2 tahun terakhir</li> <li>3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir</li> <li>4. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani</li> </ol>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Persandian	Melakukan pengisian sesuai Lampiran I dan Lampiran IIIa Instruksi Gubernur	Diskominfotik
25.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun minimal 2 tahun terakhir</li> <li>2. Target daerah dalam produksi perikanan</li> <li>3. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 2 tahun terakhir</li> <li>4. Target ekspor hasil perikanan per tahun (tahun 2018)</li> <li>5. Jumlah konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir</li> <li>6. Target konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir</li> </ol>	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
26.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi tanaman padi (ton) tahun 2018</li> <li>2. Luas areal tanaman padi (ha) tahun 2018</li> <li>3. Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (Rp Miliar) tahun 2018</li> <li>4. Jumlah total PDRB tahun 2018</li> </ol>	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
27.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2018</li> <li>2. Luas total hutan dan lahan kritis tahun 2018</li> <li>3. Luas kerusakan kawasan hutan (ha) tahun 2018</li> <li>4. Luas kawasan hutan (ha) tahun 2018</li> </ol>	Dinas Kehutanan
28.	Energi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas pengembangan liar yang ditertibkan tahun 2018</li> <li>2. Luas area penambangan yang liar tahun 2018</li> <li>3. Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan tahun 2018</li> <li>4. Jumlah total PDRB tahun 2018</li> </ol>	Dinas Perindustrian dan Energi

No.	Urusan	Data Pokok Yang Diperlukan	SKPD/UKPD
29.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kunjungan wisata minimal 2 tahun terakhir</li> <li>2. Jumlah industri pariwisata minimal 2 tahun terakhir</li> <li>3. PAD sektor pariwisata minimal 2 tahun terakhir</li> <li>4. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Rp triliun) tahun 2018</li> <li>5. Jumlah total PDRB (Rp Triliun) tahun 2018</li> </ol>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
30.	Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (Rp triliun) tahun 2018</li> <li>2. Jumlah industri minimal 2 tahun terakhir</li> </ol>	Dinas Perindustrian dan Energi
31.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2018</li> <li>2. Nilai ekspor tahun 2018</li> <li>3. Nilai impor tahun 2018</li> </ol>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
32.	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah transmigran swakarsa tahun 2018</li> <li>2. Jumlah seluruh transmigran tahun 2018</li> </ol>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33.	Fungsi Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda RPJPD</li> <li>2. Perda RPJMD</li> <li>3. Perda RKPD</li> <li>4. Jumlah program RKPD tahun 2018</li> <li>5. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2018</li> <li>6. Prioritas Daerah dalam RKPD tahun 2018 yang sesuai dengan prioritas Nasional</li> </ol>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi</li> <li>2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan</li> <li>3. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan</li> <li>4. Tanggal dan Nomor Perda Penetapan APBD Tahun 2018</li> <li>5. Tanggal dan Nomor surat Penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP No. 8/2006</li> <li>6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3/2007</li> <li>7. Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PF Nomor 58 Tahun 2005</li> <li>8. Jumlah APBD tahun 2018 dan laporan keuangan tahun 2018</li> <li>9. Jumlah Aset yang dikuasai SKPD/UKPD tahun 2018 dan jumlah aset dalam keadaan baik yang tidak digunakan SKPD/UKPD tahun 2018</li> <li>10. Realisasi pencapaian PAD</li> <li>11. Besaran Silpa tahun 2018</li> <li>12. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat</li> <li>2. BPKD</li> <li>3. BPAD</li> <li>4. BKD</li> <li>5. BPSDM</li> <li>6. BPBD</li> <li>7. BPPBJ</li> <li>8. BPRD</li> <li>9. Diskominfotik</li> <li>10. Dinas Penanggulangan Kebakaran</li> <li>11. Satpol PP</li> <li>12. Biro Tata Pemerintahan</li> <li>13. Biro Hukum</li> <li>14. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi</li> <li>15. Biro KDH dan KLN</li> <li>16. Biro Umum</li> <li>17. Biro Perekonomian</li> <li>18. Biro Penataan Kota dan LH</li> <li>19. Biro Administrasi</li> <li>20. Biro Dikmental</li> </ol>

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		13. Jumlah PNS dan CPNS Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 per SKPD dan per urusan	21. Biro Kesos
		14. Jumlah seluruh SPM tahun 2018	22. Sekretariat DPRD
		15. Jumlah seluruh MOU yang masih berlaku sampai tahun 2018	23. Walikota Jakarta Pusat
		16. Jumlah sistem informasi kepegawaian	24. Walikota Jakarta Utara
		17. Jumlah Perda Tahun 2018	25. Walikota Jakarta Barat
		18. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018	26. Walikota Jakarta Selatan
		19. Jumlah Raperda yang diusulkan oleh DPRD tahun 2018	27. Walikota Jakarta Timur
		20. Jumlah Keputusan DPRD dalam tahun 2018	Kabupaten
		21. Jumlah Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur tahun 2018	Kepulauan Seribu
		22. Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2017 dan 2018	
		23. Jumlah Temuan BPK per Desember 2018	
		24. Jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti sampai Desember 2018	
		25. Jumlah penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Badan Pusat tahun 2018	



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.